

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PADA BAGIAN KEUANGAN DI BADAN PEMBINAAN
HUKUM NASIONAL (BPHN)**

**DIAH AYU INDRIANI
8105141513**



*Building
Future
Leaders*

**Laporan Praktik Kerja Lapangan Ini Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Mendapat Gelar Sarjana Pendidikan Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

ABSTRAK

DIAH AYU INDRIANI (8105141513). Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Bagian Keuangan di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jl. May. Jendral Soetoyo No.10 Cililitan Jakarta Timur yang berlangsung pada tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 18 Agustus 2016. Praktik Kerja Lapangan yang merupakan mata kuliah wajib untuk Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi ini bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan teori yang di dapat selama perkuliahan berlangsung, sehingga praktikan mempunyai profesionalitas dalam dunia kerja Dalam laporan ini diterangkan penempatan praktikan pada Bagian Pembendaharaan di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Berdasarkan hasil observasi selama praktek kerja lapangan, praktikan menemukan kendala yaitu sistem pencatatan yang masih menggunakan sistem manual serta pencatatan tidak efektif setiap transaksi. Rekomendasi yang relevan adalah kembali meningkatkan manajemen pengetahuan, disiplin dalam pencatatan setiap transaksi.

Kata Kunci: PKL, Pelaksanaan PKL, Tujuan PKL, kendala, cara mengatasi kendala

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR

Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada Bagian Keuangan di Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Nama Praktikan : Diah Ayu Indriani
Nomor Registrasi : 8105141513
Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Menyetujui,

Ketua Program Studi
Pendidikan Ekonomi



Suparno .M.Pd
NIP. 197908282014042001

Dosen Pembimbing



Dr Saparuddin M. S.E. M.Si
NIP. 197701152005011001

LEMBAR PENGESAHAN

Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Suparno, S.Pd, M.Pd
NIP. 197908282014041001

Nama
Ketua Penguji

Tanda Tangan

Tanggal

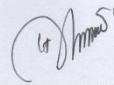
Suparno, S.Pd, M.Pd
NIP. 197908282014041001



29 November 2017

Penguji Ahli

Herlita S.Sos, M.Ec, Dev
NIP. 198401062014042002



29 November 2017

Dosen Pembimbing

Dr. Saparuddin, M.SE, M.Si
NIP. 197701152005011001



29 November 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sesuai jadwal.

Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi pada program studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan PKL yang penulis lakukan selama satu bulan (23 hari kerja) di Badan Pembinaan Hukum Nasional yang dimana tugas utama mengenai keuangan dan pembendaharaan.

Penyelesaian laporan ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2. Suparno, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi.
3. Dr. Saparuddin, M.S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Arief Rudianto, S.Ag., SH., M.Si selaku Kepala Bagian Kepegawaian yang telah menerima PKL di Badan Pembinaan Hukum Nasional.
5. Ibu Siwi Herawati, S.Sos selaku Kasubag Pembendaharaan dan pembimbing selama PKL di Badan Pembinaan Hukum Nasional.
6. Seluruh karyawan/karyawati Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan. Akhir kata, semoga penyusunan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan.....	1
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	3
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan.....	4
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan.....	5
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan.....	6
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	
A. Sejarah BPHN.....	9
B. Struktur Organisasi Keuangan.....	17
C. Kegiatan Umum Keuangan.....	19
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
A. Bidang Kerja.....	21
B. Pelaksanaan Kerja.....	22
C. Kendala Yang Dihadapi.....	26
D. Cara Mengatasi Kendala.....	27
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	29
B. Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Struktur Organisasi Bagian Keuangan BPHN.....	17

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.I	7
Tabel I.II.....	8
Tabel III.I.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL.....	32
Lampiran 2: Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL.....	33
Lampiran 3: Daftar Hadir PKL.....	34
Lampiran 4: Daftar Hadir PKL.....	35
Lampiran 5: Penilaian PKL.....	36
Lampiran 6: Sertifikat PKL.....	37
Lampiran 7: Format Penilaian Seminar PKL.....	38
Lampiran 8: Tabel Kegiatan Harian.....	39
Lampiran 9 : Kartu Konsultasi.....	40
Lampiran 10: Dokumentasi.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Semakin maju perkembangan ekonomi disertai dengan kemajuan teknologi yang mengalami perubahan dengan pesat mengharuskan sumber daya manusia memiliki kualitas diri serta menerima atas terjadinya perubahan. Sumber daya manusia merupakan modal utama bagi suatu usaha. Sumber daya manusia harus memiliki keterampilan yang dikembangkan dengan baik agar menjadi tenaga kerja yang terampil dalam dunia kerja. Oleh karena itu, mahasiswa yang termasuk dalam sumber daya manusia tersebut harus mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di dunia kerja agar kualitas diri semakin berkembang.

Dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa diharapkan memiliki kesempatan untuk mengenal lebih dalam dunia kerja melalui instansi atau perusahaan tempat bekerja sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diri. Sebagai mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebelum mahasiswa benar-benar terjun ke dunia kerja dan bersaing didalamnya, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi dan kondisi dunia kerja tersebut, Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mengadakan

Praktek Kerja Lapangan (PKL). PKL ini dilakukan pada sebuah koperasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar dapat memahami dunia kerja yang ada di sebuah Perusahaan.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan mata kuliah wajib yang terdapat dalam bagian kurikulum di Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang berbobot 2 SKS. Dengan melakukan PKL diharapkan dapat memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di dalam kelas serta memperoleh pengalaman kerja di koperasi yang dipilih sebagai tempat berlangsungnya PKL.

Diharapkan PKL ini dapat memberikan pengalaman yang berkaitan dengan ilmu yang dipelajari. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka diharapkan mahasiswa mampu memahami ilmunya dan pada akhirnya mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap dinamika koperasi dan organisasi berdasarkan permasalahan yang ada. Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih berorganisasi, lebih aktif, tanggap terhadap permasalahan serta mampu berkomunikasi yang baik dengan antar karyawan. Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk menambah wawasan, keterampilan, etika, disiplin, kemampuan dan tanggung jawab.

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktik memilih Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai tempat PKL. Praktik memilih BPHN dikarenakan praktik ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kerja pembendaharaan dan keuangan yang berada pada perusahaan BUMN.

Praktik memilih BPHN sebagai tempat berlangsungnya PKL karena di BPHN sangat mendukung adanya program PKL. Praktik ditempatkan pada bagian Pembendaharaan keuangan BPHN.

B. Maksud dan Tujuan PKL

1. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pelaksanaan PKL ini dimaksudkan untuk :
 - a. Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktek Kerja Lapangan dan persyaratan kelulusan Program S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
 - b. Mempelajari bidang pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan yang didapat perkuliahan yaitu keuangan khususnya bagian pembendaharaan yang berkaitan dengan ekonomi.
 - c. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa didapatkan di dunia kerja yang sesungguhnya
 - d. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan di perkuliahan pada dunia kerja nyata.
2. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah :
 - a. Memepersiapkan diri untuk dunia kerja
 - b. Mempraktekkan secara langsung teori yang sudah diajarkan dalam proses perkuliahan

- c. Melatih diri untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan siap untuk terjun di dunia kerja.
- d. Melatih tanggung jawab dalam bekerja

C. Kegunaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Program PKL ini memiliki manfaat yang besar bagi Mahasiswa, Fakultas Ekonomi serta perusahaan tempat praktek. Adapun manfaat PKL tersebut antara lain :

1. Bagi mahasiswa
 - a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan.
 - b. Sebagai pembanding antara ilmu yang dimiliki mahasiswa dengan kebutuhan dunia kerja.
 - c. Sebagai sarana untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan suatu pekerjaan.
 - d. Sebagai sarana untuk menambah keterampilan dan kemampuan lainnya yang di dapat di dunia kerja.
2. Bagi Fakultas Ekonomi
 - a. Mengetahui seberapa besar mahasiswa memahami materi yang didapatkan selama perkuliahan untuk dapat di terapkan didunia kerja.

- b. Menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten dan siap bersaing di dunia kerja.
 - c. Menjalin kerja sama dengan dunia usaha, lembaga BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan instansi pemerintah.
 - d. Mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja.
3. Bagi perusahaan tempat praktik
- a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL, dapat membantu pekerjaan operasional karyawan yang terkait.
 - b. Menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga pendidikan perguruan tinggi.
 - c. Membangun kemitraan dengan dunia akademik sehingga perusahaan dapat lebih dikenal di kalangan akademik.
 - d. Laporan praktek kerja lapangan yang dibuat oleh peneliti dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi mengenai situasi umum tempat praktek tersebut.

D. Tempat Praktek Kerja Lapangan

Praktek kerja lapangan kami lakukan pada bagian pembendaharaan keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Berikut ini lokasi tempat praktek kerja lapangan yang kami lakukan :

Nama : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Alamat : Jalan May. Jend. Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta 13640
Telephone : (021) 8091908, Fax (021) 8002265
Bagian : Staf Pembendaharaan Keuangan

Alasan peneliti memilih Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai tempat praktek kerja lapangan tersebut, dikarenakan BPHN bagian pembendaharaan keuangan yang menangani semua kebutuhan para karyawan dan kebutuhan perusahaan BPHN. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian praktek kerja lapangan di Pembendaharaan Keuangan BPHN.

E. Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai tempat instansi atau perusahaan yang sesuai dengan bidang kuliah praktikan yang menerima PKL. Setelah menemukan instansi atau perusahaan yang sesuai praktikan meminta surat pengantar dari bagian akademik Fakultas Ekonomi yang harus ditandatangani oleh Kepala Jurusan untuk diberikan pada pihak BAAK UNJ. Setelah mendapatkan persetujuan dari bagian akademik Fakultas Ekonomi dan BAAK UNJ, praktikan mendapatkan surat pengantar Paktik Kerja Lapangan (PKL). Pengajuan tersebut dilakukan pada awal bulan Januari 2016, surat pengantar

tersebut Praktikan berikan kepada kepala bagian kepegawaian Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kemudian pada tanggal 4 Februari 2016 kami mendapat surat jawaban atas pengajuan yang menyatakan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional mengizinkan praktikan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 18 Juli sampai dengan 18 Agustus 2016. Jam kerja mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni setiap hari senin hingga jumat pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

3. Tahap Pelaporan

Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan Juli 2016 dan dilanjutkan kembali pada bulan Agustus 2017. penulisan laporan PKL selesai pada September 2017 Penulisan dimulai dengan mencari data – data yang dibutuhkan dalam pelaporan PKL, kemudian pelaksanaan wawancara dengan narasumber, Kemudian data – data tersebut diolah dan diserahkan sebagai laporan Praktik Kerja Lapangan.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin-Jumat	08.00-16.00	12.00-13.00

Tabel 1.1 Jam Kerja dan Istirahat

s

Bulan / Tahap	Januari 2016	Juli 2016	September 2017
Persiapan			
Pelaksanaan			
Pelaporan			

Tabel I.II: Jadwal Waktu Praktek Kerja Lapangan

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Perusahaan

a. LPHN Tahun 1958

Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 institusi ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung dibawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.

Tugas LPHN pada waktu itu adalah membantu Pemerintah untuk mencapai suatu tata hukum nasional dengan melakukan berbagai upaya yang antara lain meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan keadaan dan kepentingan negara dan rakyat berdasarkan UUD 1945, pengusulan peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda yang harus diubah atau dicabut, penterjemahan dan pembakuan peristilahan hukum.

Susunan LPHN terdiri dari Ketua Umum, Pimpinan harian, sekretariat serta penasihat yang terdiri dari Menteri Kehakiman, Menteri

Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Sedangkan Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari kalangan teoritis, polisi dan praktisi hukum.

b. LPHN Gaya Baru Tahun 1964

Pada tahun 1964 LPHN yang dibentuk tahun 1961 diakhiri masa tugasnya dengan pertimbangan jangka waktu pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kepada LPHN dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 telah lampau. Namun pembinaan hukum nasional perlu dilanjutkan dan lebih diaktifkan kembali dan digaya barukan mengenai tugas, susunan dan tata kerjanya. Maka dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 282 tahun 1964 tentang Menggaya Barukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Pembaharuan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dengan bentuk Menggaya Barukan ini dengan cara mengubah persyaratan anggotanya : Berporoskan Nasakom serta dengan menyederhanakan keanggotaan penasehat Lembaga menjadi seorang yaitu Ketua Mahkamah Agung saja. LPHN ini dikepalai oleh : JCT Simorangkir SH dengan Sekretaris Ibnu Susanto, SH dengan Badan Perencana dan Panitia-panitia Kerja.

Pada tahun 1965 terjadi tragedi Nasional peristiwa G 30 S/ PKI . Setelah peristiwa 1965 itu LPHN tetap terus berjalan dengan mendasarkan pada Keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1964 dengan meniadakan

unsur komunis dalam keanggotaannya. Lembaga ini terus bekerja dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/ KEP /11/1966 tanggal 3 Nopember 1966 Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi : “Badan yang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen yang menurut undang-undang yang masih berlaku tetap berjalan sampai ada ketentuan lain”

Sebagai catatan, bahwa pada tahun 1967 Pimpinan MPRS telah menyampaikan surat kepada Ketua Presidium Kabinet dan Ketua DPR-GR antara lain mengenai kedudukan lembaga ini agar ditempatkan dibawah Presiden yang dalam penyelenggaraan sehari-hari dilaksanakan oleh Presidium Kabinet atau alat kelengkapan yang sederajat dengan itu dengan pemberian hak otonomi seluas-luasnya kepada Kepalaanya untuk memungkinkan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masuarakat.

- c. LPHN menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 1971-1974

Sampai dengan tahun 1971 LPHN tetap berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1964 tetapi khusus mengenai Sekretariat Lembaga Pembinaan Hukum Nasional diatur dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J. S.4/8/1 tanggal 1 Juni 1971 yaitu mengenai Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Sekretariat Lembaga Pembinaan Hukum Nasional departemen Kehakiman.

Pada tahun 1974 Presiden Soeharto dalam pidato pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung serta pelantikan Menteri Kehakiman Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H.,LL.M dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan antara lain :” Dalam rangka pembangunan hukum nasional itu saya minta agar Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang telah ada lebih digiatkan lagi”

Harapan Presiden Soeharto tersebut oleh Pimpinan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sangat direspon dan dengan dukungan Menteri Kehakiman maka diselenggarakanlah Seminar Hukum nasional III di Surabaya yang memiliki arti penting karena dalam sambutan tertulisnya Presiden Soeharto antara lain mengatakan :“ Saya menaruh perhatian yang khusus pada Seminar Hukum Nasional III yang diadakan di Surabaya ini, karena hukum mempunyai kedudukan dan harus memainkan peranan yang penting dalam pembangunan bangsa kita. Sehubungan dengan itu saya sangat gembira, karena permintaan saya begitu cepat terlaksanan dalam wujud diadakannya Seminar Hukum Nasional III ini oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional”

Pada tahun 1974 terjadi perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional dan mempunyai kedudukan sebagai Eselon I dibawah Departemen Kehakiman.

d. BPHN Tahun 1974 – 2008 (tahun emas 50 tahun)

Sejak tahun 1974 terjadi beberapa kali perubahan struktur organisasi sebagai berikut :

- Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974 jo Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/3/7 tahun 1975 :

1. Kepala : JCT Simorangkir, SH
2. Sekretaris : Drs. Suroso
3. Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi : PC Hadiprastowo, SH
(sampai 1979) Pengembangan Hukum: Teuku Mohammad Radhie, SH
5. Pusat Dokumentasi Hukum : MH Hardjito Notopuro, SH

- Keputusan Presiden RI No. 136 tahun 1999 Departemen Kehakiman berubah menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak mengalami perubahan dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor. M.03.PR.07.10 Tahun 1999.

1. Kepala : Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M (2004)
2. Sekretaris : L Sumartin, SH
3. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional : Achmad Ubbe,
S.H.,MH, APU
4. Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional :M.R Sarumala, SH
5. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum : Syaiful Watni, SH

6. Pusat Penyuluhan Hukum : Sri Badini Amidjoyo, SH,MH

Keputusan Presiden RI No. 165 tahun 2000 perubahan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia jo Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.04.PR.07.10 tahun 2004 jo Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2005 jo Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.09.PR.07.10 tahun 2007

1. Kepala :
 1. Prof. Dr. Abdul Gani, SH (2007)
 2. Prof. Dr. Ahmad M Ramli, SH, MH
2. Sekretaris :
 1. L. Sumartini, SH (2005)
 2. Sri Badini Amidjoyo, SH, MH (2007)
 3. Bambang Iriana Djajaatmaja SH, LL.M
3. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional:
 1. Alim Wardoyo Magiono, SH (2005)
 2. Achmad Ubbe, SH.MH. APU (2006)
 3. Charijah, SH, MH, Phd
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum :
 1. Achmad Ubbe, SH.MH. APU (2005)
 2. Prof. Dr. Jeane Neltje Sally, SH,MH (2007)
 3. Sadikin, SH,MH
5. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional :
 1. Syaiful Watni, SH, (2007)

2. Sulastrri Helmi,SH (2008)

3. Ajarotni Nasution SH,MH

6. Pusat Penyuluhan Hukum :

1. Sri Badini Amidjoyo, SH, MH (2005)

2. Sulastrri Helmi, (2007)

3. Widi Asmoro, SH, MH (2008)

4. Dra. Susy Susilowati, SH, MH

Keputusan Presiden RI No. 141/M tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Kepala: DR. Wicipto Setiadi S.H., M.H

2. Sekretraris : Sadikin Sabirin SH., M.H

3. Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional:

Agus Subandriyo SH., M.H

4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional:

Yunan Hilmy SH., M.H

5. Kepala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional:

Drs. Buddy Wihardja M.Si

6. Kepala Pusat Penyuluhan: Audy Murfi SH., M.H

Keputusan Presiden Nomor 112/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

1. Kepala : Prof. DR. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum
2. Sekretaris : 1. Sadikin Sabirin, SH., MH
 2. Danan Purnomo, SH., M.Si
3. Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional :
 1. Agus Subandriyo, SH MH
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional
 1. Yunan Hilmy, SH., MH
 2. Pocut Eliza, S.Sos., SH., MH
5. Kepala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
 1. Drs. Buddy Wihardja, M.Si
6. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum
 1. Audy Murfi, SH., MH

Hingga sekarang diusianya yang ke-57 tahun BPHN lebih memfokuskan pada tugas perencanaan hukum serta penyusunan Program Legislasi Nasional, Pembinaan dan Pengembangan Sistem Hukum melalui kegiatan penelitian dan pengkajian hukum serta penyediaan layanan informasi hukum, perpustakaan hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara Nasional serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan atau diseminasi hukum guna terwujudnya sistem dan politik hukum nasional yang mantap dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Visi Misi

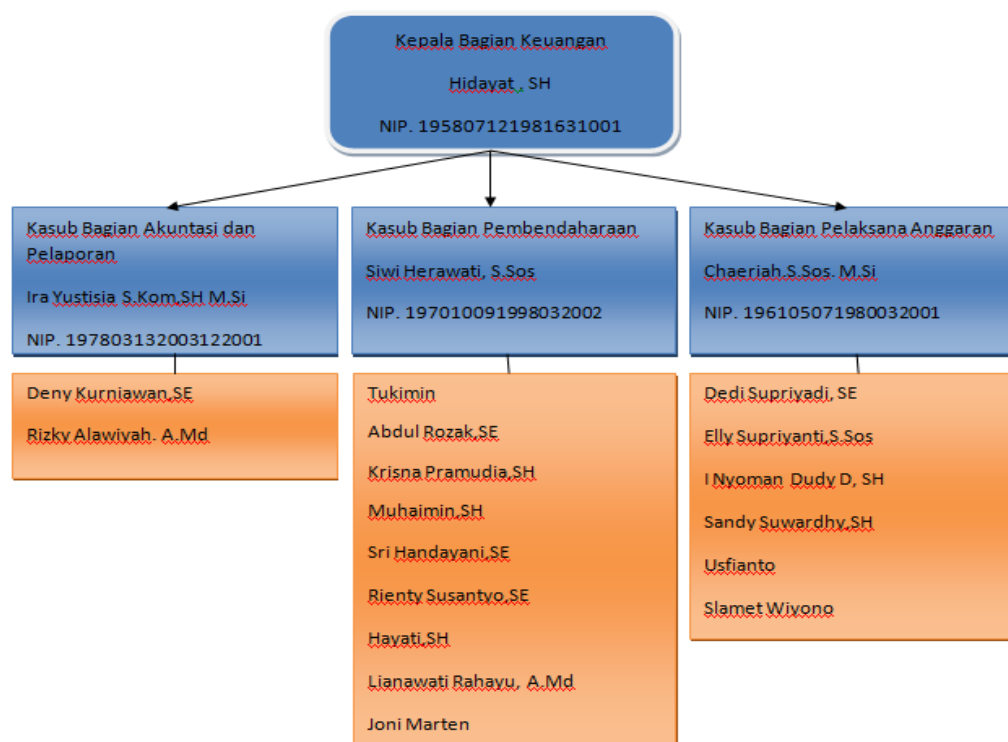
Visi : "Masyarakat memperoleh kepastian hukum".

Misi :

1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

B. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan usahanya tentu BPHN dipimpin dan dibantu oleh pengurus dan juga beberapa staf atau pegawai. Dimana kedudukan pengurus serta staff atau pegawai tersebut digambarkan kedalam sebuah struktur



organisasi. Adapun struktur organisasi BPHN di gambar adalah sebagai berikut.

Gambar II.I Struktur Organisasi Keuangan

Kepala Bagian Keuangan : Hidayat,SH

Kasub Bagian Akutansi dan Pelaporan : Ira Yustisia S.Kom,SH M.Si

-Deny Kurniawan,SE

-Rizky Alawiyah,A.Md

Kasub Bagian Pembendaharaan : Siwi Herawati, S.Sos

- Tukimin

- Abdul Rozak,SE

- Krisna Pramudia,SH

- Muhaimin,SH

- Sri Handayani,SE

- Rienty Susantyo,SE

- Hayati,SH

- Lianawati Rahayu, A.Md

- Joni Marten

Kasub Bagian Pelaksanaan Anggaran : Chaeriah.S.Sos. M.Si

- Dedi Supriyadi, SE

- Elly Supriyanti,S.Sos

- I Nyoman Dudy D, SH

- Sandy Suwardhy,SH
- Usfianto
- Slamet Wiyono

D. Kegiatan Umum Perusahaan

BPHN memiliki berbagai kegiatan keuangan, yaitu :

Tugas

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- Penyiapan bahan penatausahaan, pembendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Bagian Keuangan terdiri atas :

- Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- Subbagian Perbendaharaan; dan
- Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

1. Subbagian Pelaksana Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan penggajian di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
2. Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perbendaharaan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.
3. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIKAN KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Selama Praktik Kerja Lapangan di Badan Pembinaan Hukum Nasional praktikan ditempatkan di Bagian Keuangan, dalam praktiknya pekerjaan disana memerlukan ketelitian yang tinggi, menggunakan teknologi dengan handal dan sikap ramah terhadap karyawan yang lainnya. Semua itu sangat penting karena kenyamanan merupakan prioritas dalam menjalankannya.

Dalam melaksanakan tugasnya praktikan menerapkan apa saja yang sudah dipelajari sebelumnya dalam mata kuliah yang ada. Dengan mengingat mata kuliah yang sebelumnya diambil membuat praktikan lebih mudah dalam menjalankan tugas yang diberikan saat praktik kerja lapangan karena mengaplikasikan apa yang sudah didapat.

Selama kegiatan PKL di Badan Pembinaan Hukum yang berlangsung selama satu bulan, praktikan di tempatkan pada bagian pembendaharaan. pada pembendaharaan bertugas untuk mencatat data pengeluaran kebutuhan karyawan maupun perusahaan mulai dari kegiatan konsumsi hingga alat tulis kantor (ATK).

Bidang kerja di bagian Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat 3 (tiga) bagian yaitu : Pelaksanaan Anggaran, Perbendaharaan, dan Akuntansi dan Pelaporan. Praktikan ditempatkan dibagian Perbendaharaan

Badan Pembinaan Hukum Nasional praktikan juga mengerjakan tugas-tugas lainnya bersama karyawan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Semua karyawan perbendaharaan diawasi langsung oleh ketua perbendaharaan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang bernama Ibu Siwi Herawati. S.sos yang sekaligus beliau juga merupakan pembimbing praktikan selama kegiatan PKL berlangsung. Praktikan juga dinilai oleh Ketua perbendaharaan Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu Ibu Siwi Herawati.,S.sos. Praktikan selama PKL diberikan tugas diantaranya:

- a. Menangani kegiatan Surat menyurat
- b. Mengekspedisi surat
- c. Mengantarkan surat
- d. Perekan menggunakan Microsoft excel
- e. Pengecekan kwitansi/nota dan Pemberian nomor kwitansi dengan nota konfirmasi

B. Pelaksanaan Kerja

Tugas Praktikan di Perbendaharaan Badan Pembinaan Hukum Nasional antara lain:

1. Menangani kegiatan Surat menyurat

Menangani kegiatan surat menyurat yaitu Mengagendakan Surat Masuk dan Surat Keluar. Surat masuk maupun surat keluar perlu diagenda supaya ada bukti penerimaan surat maupun pengiriman surat.

2. Mengekspidisi Surat

Sebelum surat masuk beserta lembar disposisi dikirimkan ke unit masing masing bagian yang dituju, surat tersebut perlu diekspidisi (dicatat nomer surat, tanggal surat, asal surat, tanggal terima, Perihal, ditujukan ke siapa, isi disposisi, tanggal disposisi, tanggal paraf terima disposisi).

3. Mengantar surat

Mengantarkan surat ke bagian yang dituju sekaligus meminta paraf sebagai tanda terima di buku agenda.

4. Perekapan dengan Microsoft excel

Setelah itu direkap di komputer menggunakan microsoft excel dengan format yang ditujukan.

- a. Menggandakan dokumen(Fotocopy), surat maupun berkas
- b. Melakukan kegiatan pembagian surat undangan ke tiap sub divisi
- c. Membantu menyiapkan gaji para pegawai.

5. Pengecekan kwitansi/Nota dan pemberian nomor kwitansi dengan Nota konfirmasi

Pengecekan kwitansi/nota sendiri dilakukan apabila terdapat penggunaan dana ataaau permohonan dana yang diajukan oleh karyawan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kwitansi yang diberikan akan di cocokan dengan jumlah anggaran yang diminta oleh para karyawan

yang kemudian akan dicocokkan dengan nota konfirmasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan pada saat penghitungan dana yang ada. Kemudian pemberian nomor pada kwitansi akan disesuaikan dengan nomor kwitansi yang ada sebelumnya secara berurutan.

Tugas-tugas tersebut dikerjakan selama satu bulan. Tepatnya selama 24 hari kerja. Tugas diberikan mulai dari hari Senin, 18 Juli 2016 dan selesai pada hari Kamis, 18 Agustus 2016. Dalam melaksanakan tugas, mahasiswa tidak dibebankan tugas yang banyak oleh pegawai.

1. Menginput data pengeluaran keuangan
2. Membantu dalam membagi tunjangan
3. Mencatat serta merekap pengeluaran
4. Melaporkan pada bagian akuntansi
5. Membuat surat laporan mengenai pengeluaran

Selama menempati pada bagian pembendaharan, praktikan selalu diawasi serta dibimbing oleh kasubag pembendaharan dan bagian staf lainnya agar bila ada kesulitan atau kendala yang dihadapi, maka dapat bertanya dan langsung dibimbing oleh karyawan yang sudah mengerti bidang pada saat berlangsungnya PKL.

Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan kurang lebih selama satu bulan. Kegiatan PKL ini dilakukan sesuai hari kerja yang berlaku pada BPHN yaitu Senin hingga Jum'at dengan waktu kerja pukul 08.00

– 16.00 WIB. Selama Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan bertugas sebagai berikut :

1. Menginput data pengeluaran keuangan

Tugas menginput data dan pengeluaran keuangan adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan dalam pelaksanaan PKL di BPHN. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi dan keperluan perusahaan.

2. Membantu dalam pembagian tunjangan

Kegiatan ini dilakukan setiap bulan pada saat penggajian dilakukan oleh seluruh bagian keuangan memasukkan uang sesuai dengan tingkat dan jabatan kemudian membagikan sesuai data gaji pokok dan tunjangan.

3. Mencatat serta merekap pengeluaran keuangan

Tugas berikut yaitu menyusun daftar tagihan perusahaan. Daftar tagihan tersebut berupa bukti pembayaran konsumsi maupun ATK yang dilakukan oleh pihak perusahaan secara tunai. Penyusunan daftar tagihan tersebut disesuaikan dengan nama perusahaan, subbagian perusahaan dan tanggal pembelian konsumsi dan ATK tersebut.

4. Melaporkan pada bagian akuntansi

Setelah pencatatan pengeluaran keuangan kemudian dilaporkan pada bagian akuntansi agar dibuat peloran keuangan oleh bagian akuntansi.

5. Membuat surat pelaporan pengeluaran keuangan

Setelah pencatatan pengeluaran selesai kemudian kepala bagian pembendaharaan melakukan pelaporan pengeluaran pada kepala bagian keuangan yang kemudian akan di serahkan kepada bagian kesekretariatan.

Matriks Kegiatan

Tanggal	Minggu Ke-1	Minggu Ke-2	Minggu Ke-3	Minggu Ke-4
Kegiatan	Pencatatan kegiatan acara beserta konsumsi dan pembelian keperluan ATK	Melakukan penginputan Pengeluaran keuangan.	membantu bu Yanti dalam merekap pengeluaran	Membuat surat terkait pengeluaran. Serta proses pembagian gaji karyawan.

Tabel III.I

C. Kendala yang di hadapi

Dalam melaksanakan pekerjaan di BPHN, praktikan berusaha untuk melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik dan teliti. Setiap pekerjaan yang dilakukan, diimbangi dengan rasa tanggung jawab pada setiap pekerjaan. Akan tetapi dalam melaksanakan semua pekerjaan, praktikan mengalami beberapa kendala yang menyebabkan praktikan menjadi tidak maksimal dalam

melaksanakan pekerjaan. Kendala yang dihadapi oleh praktikan selama melaksanakan pekerjaan di BPHN antara lain :

1. Keterbatasan tempat untuk menaruh data yang telah selesai.

Keterbatasan tempat dimaksudkan keterbatasan rak maupun alat tulis kantor (ATK). Keterbatasan tempat tersebut menyebabkan penataan dari barang sembako maupun ATK sedikit terlihat kurang rapih.

2. Mesin Fotocopy yang terbatas

Dalam ruangan bagian keuangan hanya terdapat satu mesin fotocopy penggunaannya pun bergantian terkadang harus mengantri karena kadang ada karyawan lain dari bagian lain yang menggunakan mesin fotocopy tersebut.

3. Pencatatan pelaporan keuangan

Dalam proses pencatatan terkadang tidak sesuai dengan bukti fisik pembayaran seperti dalam pelaporan lebih sedikit daripada bukti pembayaran sehingga tidak sesuai dengan pencatatan hal tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan yang dikeluarkan oleh bagian pembendaharaan kepada bagian akuntansi karena harus memeriksa kembali pengeluaran.

4. Kurangnya Motivasi

Kurangnya motivasi karyawan dalam mengerjakan tugasnya sehingga menyebabkan banyaknya pekerjaan yang menumpuk hal tersebut dapat dilihat melalui jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan.

Permasalahan tersebutlah yang juga membuat keterlambatan dalam penyeteroran laporan keuangan.

D. Cara mengatasi kendala

Adapun hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi dari kendala-kendala yang di hadapi sebagai berikut:

1. Menambah lemari atau tempat menaruh berkas

Untuk mengatasi kendala ini seharusnya menambah lemari atau tempat menaruh berkas agar berkas yang ada tersimpan dengan baik dan tertata sehingga jika ada kesalahan atau pemeriksaan kembali berkas-berkas pengeluaran memudahkan untuk mencarinya kembali.

2. Penambahan mesin Fotocopy

Demi kelancaran dalam proses pencatatan dan perekapan di perlukan mesin fotocopy tambahan agar dalam merekap data mudah dan tidak terlalu lama mengantri.

3. Kurangnya Motivasi

Berdasarkan permasalahan mengenai kurangnya motivasi karyawan dalam mengerjakan tugasnya seharusnya sebagai kepala bidang memberikan sesuatu yang dapat meningkatkan motivasi karyawan seperti

motivasi seorang karyawan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.¹

Berdasarkan teori tersebut terdapat kaitan antara imbalan dengan prestasi yang mempengaruhi secara internal yaitu keinginan , kepuasan kerja serta prestasi yang dihasilkan sedangkan secara eksternal dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan.

¹ Siagin, Sondang P, Manajemen Sumber Daya Manusia, cet 20, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, Hlm 294

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), praktikan menyimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh Praktikan memberi manfaat yang cukup besar terutama pada bidang keuangan dimana banyak hal yang tidak didapat praktikan di dunia perkuliahan.
2. Pada dasarnya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) menuntut bagaimana kita memahami cara bekerja di bagian keuangan dan berjalannya sistem keuangan khususnya pembendaharaan yang sebenarnya. Serta bagaimana pengaplikasian teori perkuliahan di dunia kerja.
3. Banyak kendala yang dihadapi oleh praktikan pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang kurang memadai serta keterbatasan alat.

B. Saran

1. Saran untuk praktikan :
 - a) Mempersiapkan diri sebaik mungkin terkait pelaksanaan kegiatan PKL mulai dari administrasi hingga data-data yang di butuhkan dalam membuat laporan PKL

- b) Pada pelaksanaan PKL di koperasi, mahasiswa sehendaknya bersikap professional yang di imbangi dengan rasa penuh tanggung jawab, berkomitmen dan disiplin.

2. Saran untuk koperasi :

- a) Diharapkan dalam proses pencatatan sebaiknya dilakukan secara teliti dan tepat waktu agar tidak ada data yang terlewat .
- b) Menambah mesin fotocopy untuk menambah serta mempermudah kerja.

2. Saran untuk universitas :

- a) Menjalin silaturahmi antara BPHN dengan Universitas Negeri Jakarta agar ke depannya dapat menerima mahasiswa yang ingin melaksanakan PKL pada koperasi dengan keterampilan dan keahlian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2008. *Pedoman Praktik Kerja*

Lapangan. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Siagin, Sondang P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

www.bphn.go.id (diakses tanggal 30 Mei 2017).

Lampiran 1

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Jalan May.Jen Sutoyo – Cililitan Jakarta Timur 13640
 Telp. (021) 8091908-Faksimili (021) 8002265-8011753.Website www.bphn.go.id

Nomor : **PHN/ P.07.03-24** 16 Juni 2016
 Lampiran : -
 Perihal : Penempatan Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth.
 Kepala Biro Administrasi
 Akademik dan Kemahasiswaan
 Universitas Negeri Jakarta
 Di-
 Jakarta

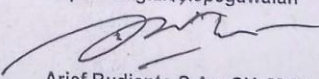
Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 3403/UN39.12/KM/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan, setelah kami membaca dan memahami isi dari surat Saudara, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan Mahasiswi an.

No	Nama	NIM	Program Studi	Keterangan
1	Diah Ayu Indriani	8105141513	Ekonomi	-
2	Liä Maulidia	8105141450	Ekonomi	-

melaksanakan PKL untuk kuliah tugas akhir di Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan persyaratan mahasiswi tersebut bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Adapun tempat melaksanakan PKL pada Bagian Keuangan mulai bulan Juli s.d Agustus 2016

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian ~~Kepegawaian~~

 Arief Rudianto.S.Ag.,SH.,M.Si
 NIP. 19680207 199909 1 001

Tembusan
 - Kepala Bagian Keuangan, BPHN

Lampiran 2



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan May. Jend. Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta 13640
Telp. (021)8091908 Faks. (021) 8002265 Website : www.bphn.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : PHN.1-KP.07.05-590

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arief Rudianto,S.Ag.,SH.,M.Si
N I P : 19680207 199903 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian
Badan Pembinaan Hukum Nasional

dengan ini menerangkan bahwa :

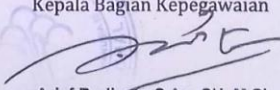
Nama : Diah Ayu Indriani
N I M : 8105141513
Jurusan : Ekonomi
Pendidikan : Universitas Negeri jakarta

Benar bahwa Mahasiswa/i tersebut di atas telah selesai melakukan Riset pada bagian Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 September 2016

Kepala Bagian Kepegawaian


Arief Rudianto,S.Ag.,SH.,M.Si.
NIP. 19680207 199903 1 001



Lampiran 3



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227- 4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.unj.ac.id/fe



DAFTAR HADIR

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

2
SKS

Nama : Diah Ayu Indriani
No. Registrasi : 8105141513
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Tempat Praktik : BPHU
Alamat Praktik/Telp : Jl. Majend Sutoyo No.10

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 18 Juli 2016	1. <i>dyu</i>	
2.	Selasa, 19 Juli 2016	2. <i>dyu</i>	
3.	Rabu, 20 Juli 2016	3. <i>dyu</i>	
4.	Kamis, 21 Juli 2016	4. <i>dyu</i>	
5.	Jumat, 22 Juli 2016	5. <i>dyu</i>	
6.	Senin, 25 Juli 2016	6. <i>dyu</i>	
7.	Selasa, 26 Juli 2016	7. <i>dyu</i>	
8.	Rabu, 27 Juli 2016	8. <i>dyu</i>	
9.	Kamis, 28 Juli 2016	9. <i>dyu</i>	
10.	Jumat, 29 Juli 2016	10. <i>dyu</i>	
11.	Senin, 1 Agustus 2016	11. <i>dyu</i>	
12.	Selasa, 2 Agustus 2016	12. <i>dyu</i>	
13.	Rabu, 3 Agustus 2016	13. <i>dyu</i>	
14.	Kamis, 4 Agustus 2016	14. <i>dyu</i>	
15.	Jumat, 5 Agustus 2016	15. <i>dyu</i>	

Catatan :

Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



Surabaya, 5.2016

Lampiran 4



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon (021) 4721227 - 4706285, Fax (021) 4706285
 Laman: www.unj.ac.id/fe



DAFTAR HADIR
 PRAKTEK KERJA LAPANGAN
 2 SKS

Nama : Diah Ayu Indriani
 No Registrasi : 8105141013
 Program Studi : Pendidikan Ekonomi
 Tempat Praktik : BPHN
 Alamat Praktik/Telp : Jk Mayjend Sutuyo No.10


NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 8 Agustus 2016	1. <i>[Signature]</i>	
2.	Selasa, 9 Agustus 2016	2. <i>[Signature]</i>	
3.	Rabu, 10 Agustus 2016	3. <i>[Signature]</i>	
4.	Kamis, 11 Agustus 2016	4. <i>[Signature]</i>	
5.	Jum'at, 12 Agustus 2016	5. <i>[Signature]</i>	
6.	Senin, 15 Agustus 2016	6. <i>[Signature]</i>	
7.	Selasa, 16 Agustus 2016	7. <i>[Signature]</i>	
8.	Kamis, 18 Agustus 2016	8. <i>[Signature]</i>	
9.		9.	
10.		10.	
11.		11.	
12.		12.	
13.		13.	
14.		14.	
15.		15.	

Catatan:
 Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



[Signature] Wah, S. Suf

Lampiran 5


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
 Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon (021) 4721227-4796285, Fax: (021) 4796285
 Email: www.unj.ac.id/fe


 ISO 9001:2000 CERTIFIED
 CERTIFICATE NO.
 15000A0001

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (S1)
 ..2... SKS

Nama : Diah Ayu Indriani
 No.Registrasi : 8105141513
 Program Studi : Pendidikan Ekonomi
 Tempat Praktik : BPHN
 Alamat Praktik/Telp : Jl. Mayjend Sutuyo No.10

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 50-100	KETERANGAN				
1	Kehadiran	<u>90</u>	1. Keterangan Penilaian :				
2	Kedisiplinan	<u>90</u>	Skor Nilai Predikat				
3	Sikap dan Kepribadian	<u>85</u>	80-100 A Sangat baik				
4	Kemampuan Dasar	<u>85</u>	70-79 B Baik				
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	<u>87</u>	60-69 C Cukup				
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	<u>85</u>	55-59 D Kurang				
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	<u>87</u>	2. Alokasi Waktu Praktik :				
8	Aktivitas dan Kreativitas	<u>87</u>	2 sks : 90-120 jam kerja efektif				
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	<u>86</u>	3 sks : 135-172 jam kerja efektif				
10	Hasil Pekerjaan	<u>86</u>	Nilai Rata-rata :				
			$\frac{868}{10} = 86,8$ 10 (sepuluh)				
	Jumlah	<u>868</u>	Nilai Akhir :				
			<table border="1"> <tr> <td><u>86,8</u></td> <td><u>A</u></td> </tr> <tr> <td>Angka bulat</td> <td>huruf</td> </tr> </table>	<u>86,8</u>	<u>A</u>	Angka bulat	huruf
<u>86,8</u>	<u>A</u>						
Angka bulat	huruf						


 Badan Penasehat Pembinaan dan Pengawasan

Catatan :
 Mohon legalitas dengan membalut cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 6



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

Sertifikat

Nomor : PHN.1.KP.07.03-800

Diberikan kepada :

Nama : Diah Ayu Indriani
NIM : 8105141513
Jurusan : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta

telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan(PKL) pada kantor Badan
Pembinaan Hukum Nasional mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai
dengan tanggal 31 Agustus 2016 dengan hasil

"SANGAT BAIK"

Jakarta, 06 September 2016

Kepala Bagian Kepegawaian

Arief Rudianto, S.Ag.,S.H.,M.Si
NIP. 19680207199931001

Lampiran 7

Format Penilaian Seminar Praktik Kerja Lapangan

**FORMAT PENILAIAN
SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Nama : Diah Ayu Indriani
No. Reg : 8105141513
Konsentrasi : Pendidikan Ekonomi Koperasi 2014


No.	Kriteria Penilaian	Interval Skor	Skor
Penilaian Laporan PKL			
1.	Format Makalah a. Sistematika Penulisan b. Penggunaan bahasa yang baku, baik, dan benar	0-15	
2.	Penyajian Laporan a. Relevansi topik dengan keahlian bidang studi b. Kejelasan uraian	0-25	
3.	Informasi a. Keakuratan informasi	0-15	
Penilaian Presentasi Laporan			
1.	Penyajian a. Sistematika Penyajian b. Pengguna alat bantu	0-20	

	c. Penggunaan bahan lisan yang baik, benar dan efektif		
2.	Tanya Jawab a. Ketepatan jawaban b. Kemampuan mempertahankan argumen	0-20	
Jumlah		100	

Jakarta,
Penilai,


NIP.

Lampiran 9



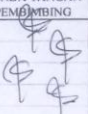
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI


Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721223/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.itsj.ac.id



KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL

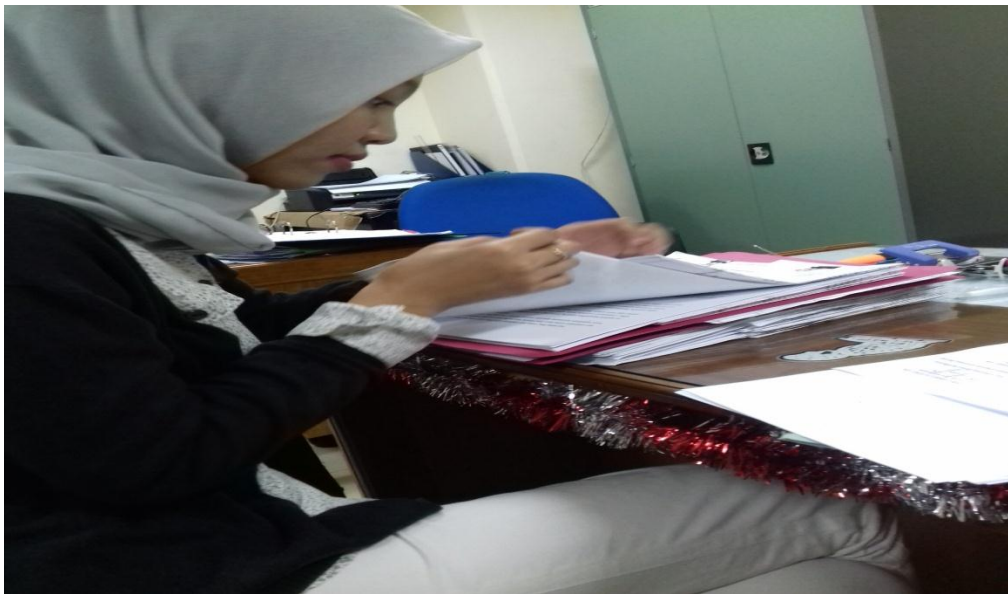
1. Nama Mahasiswa : Diah Ayu Indriani 5. Judul PKL : Laporan Praktik Kerja
 2. No.Registrasi : 8105191513 Lapangan pada Bidang Keuangan
 3. Program Studi : Pendidikan Ekonomi di Badan Pembinaan Hukum Nasional
 4. Dosen Pembimbing : Dr. Saparudin, M.Si, M.Si (BPHN)
 NIP. 197701152005011001

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	08/09/2017	Bab I		
2		Bab II		
3		Bab III		
4		Bab IV		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

SETUJU UNTUK UJIAN PKL 

Catatan :
 1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi
 2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

Lampiran 10





LAMPIRAN -LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Jln. May. Jend. Sutoyo No. 10 Cililitan - Jakarta Timur 13640
 Telp. 021-8091908 Fax. 021-8011754 / 8002265 Website: www.bphn.go.id

UANG MUKA KEGIATAN DISKUSI PUBLIK
 Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, Infrastruktur
 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
 Makassar, 8-10 Agustus 2016

NO.	NAMA KEGIATAN	Nominal (Rp)
1.	Diskusi Publik Pokja Mengenai Peningkatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan	
	• Biaya Fc Bahan	1.500.000
	• Biaya Konsumsi Fullday (40 org @Rp 75.000,-)	3.000.000
	• Biaya Dokumentasi	500.000
	• Biaya Konsumsi Rapat Panitia Daerah (4 org X 5 kali @Rp 60.000)	1.200.000
	• Biaya Pembuatan Spanduk (1 buah @Rp 500.000,-)	500.000
	• Biaya pembelian seminar kit (40 buah @Rp 30.000)	1.200.000
	• Honor Ketua Pelaksana (1 org @Rp 400.000,-)	400.000
	• Honor Anggota Pelaksana (3 org @Rp 300.000,-)	900.000
	• Honor Ketua Pelaksana (1 org @Rp 700.000,-) Federatif	700.000
	• Jasa Profesi Narasumber (4 org x 3 jam @Rp 1.000.000,-)	12.000.000
	• Tiket Jakarta - Makassar PP 6 org Anggota Tim & 1 org Narasumber (7 org @Rp 3.500.000,-)	24.500.000
	• Uang Harian 6 org Anggota Tim & 1 org Narasumber (7 org X 3 hari @Rp 430.000,-)	9.030.000
	• Biaya Penginapan Ess II (1 org x 2 malam @Rp 1.400.000,-)	2.800.000
	• Biaya Penginapan Gol IV (1 org x 2 malam @Rp 800.000,-)	800.000
	• Biaya Penginapan Gol III (5 org x 2 malam @Rp 580.000,-)	5.800.000
	• Uang Taksi PP (7 org X 2 kali @Rp 315.000,-)	4.410.000
	• Penggantian Transport Peserta Lokal luar BPHN di Daerah (25 org @Rp 150.000,-)	3.750.000
	• Biaya Pengiriman surat/undangan kegiatan Diskusi Publik di daerah	1.000.000
	JUMLAH	74.790.000
		Pajak 2.209.091
		72.580.909

Kepala Bidang Ekonomi, Keuangan,
 Industri, Perdagangan, Infrastruktur

Sukesti Inani, S.H., M.H.
 NIP. 19621018198903 2 001

Pejabat Pembuat Komitmen
 BPHN

Heru Triawan, S.H.
 NIP. 1985061120061001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000073-000

Kementerian	(013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI	Jenis SPP : 2	DIPA	: DIPA-013.10.1.409
Unit Organisasi	(10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	GUP NIHIL		07-12-2015
Lokasi	(01) DKI JAKARTA		Kode Kegiatan	: 1611
Satuan Kerja	(409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL		Kode Output	: 005
Alamat	Jl. May. Jend. Sutoyo Cililitan Jakarta Timur	Pagu Output:	Tahun Anggaran	: 2016
		675.824.000	Bulan	: 06

Bukti Pengeluaran

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	011002 27-06-2016	FC MCM Cs Biaya fotocopy bahan Jurnal AE Hukum (Rechtsvinding) sesuai no. kuitansi 011002 s/d 011003 a.n FC MCM Cs		521211	400.500
2	011007 27-06-2016	Ayam Goreng Fatmawa Biaya konsumsi rapal Jurnal AE Hukum (Rechtsvinding) sesuai no. kuitansi 011007 s/d 011008 a.n Ayam Goreng Fatmawati Cs		521211	1.024.000
3	011036 27-06-2016	RM Cawang Sederhana Biaya konsumsi rapal pokja penyusunan DPHN sesuai no. kuitansi 011.036 s/d 011.037 a.n RM Cawang Sederhana Cs		521211	896.000
4	011038 27-06-2016	FC MCM Cs Biaya fotocopy bahan pokja penyusunan DPHN sesuai no. kuitansi 011038 s/d 011039 a.n FC MCM Cs		521211	249.900
5	011004 27-06-2016	Dwi Agustine Cs Biaya transport lokal kegiatan penerbitan jurnal AE Hukum (Rechtsvinding) sesuai no. kuitansi 011.004 s/d 011.006 a.n Dwi Agustine Cs		524113	300.000
6	011040 27-06-2016	Apri Listiyanto Cs Biaya transport lokal kegiatan kelompok kerja penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional sesuai No.,Kuitansi 011.046 s.d 011.045 a.n Apri Listiyanto Cs		524113	600.000
Jumlah Lampiran 6 Lembar			Jumlah SPP ini :		3.470.400
			Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :		102.169.532
			Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :		105.639.932

Jakarta, 30-06-2016

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Heru Triawan, SH
NIP. 198506112006041001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal : 14-JUL-2016

KPPN : JAKARTA V
Kode Saliker : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No Urut	KPPN	Nomor Rekening	Tanggal Buku	Nama WP/WB/WS	NTPN - NTB	Akun	Mata Uang	Jumlah Setor	Keterangan
1		3010194605	24-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	008573DUMM4RJT09 - 000000083069	411121	IDR	2.385.000,00	Ada
2		1230006072534	01-JUL-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	03275512IGHVOLMO - 000000294465	411121	IDR	105.000,00	Ada
3		3010194605	30-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	0466C054Q7ONG6B9 - 000000651251	411122	IDR	510.400,00	Ada
4		3010194605	24-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	1060F3C3378KSTO9 - 000000563195	411121	IDR	1.350.000,00	Ada
5		1230006072534	01-JUL-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	159955V639IEGQMO - 000000398447	411121	IDR	450.000,00	Ada
6		3010194605	30-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	18C028LPJUCGOB9 - 000000768777	411122	IDR	54.550,00	Ada
7		1230006072534	01-JUL-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	1CE76V4B3J4V4EMO - 000000374231	411121	IDR	1.755.000,00	Ada
8		1230006072534	01-JUL-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	1F26855VRP72BRMO - 000000392871	411121	IDR	1.800.000,00	Ada
9		3010194605	24-JUN-2016	PUTRA SUSOH MANDIRI	279E73DFBDDL4F09 - 000000796926	411122	IDR	40.900,00	Ada
10		3010194605	30-JUN-2016	EBEN HAEZER	28A358LNICC723B9 - 000000757446	411211	IDR	272.727,00	Ada
11		3010194605	24-JUN-2016	PERINTIS ARDATAMA	2DBEA3ECSMP2TV09 - 000000158562	411211	IDR	454.427,00	Ada
12		3010194605	24-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	2F19F3DKAJOBKOO9 - 000000208983	411121	IDR	450.000,00	Ada
13		3010194605	30-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	3499C8LQOPN857B9 - 000000765532	411211	IDR	181.818,00	Ada
14		3010194605	30-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	34A1CB8NFK8P1FB9 - 000000249381	411121	IDR	105.000,00	Ada
15		3010194605	24-JUN-2016	PUTRA SUSOH MANDIRI	3F94D3C3A9GH7909 - 000000259321	411122	IDR	34.100,00	Ada
16		3010194605	24-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	3FAF63BILSN4GQO9 - 000000446688	411121	IDR	450.000,00	Ada
17		3010194605	24-JUN-2016	DIVA INSAN KREASI	413763B8TJP02F09 - 000000451392	411121	IDR	38.400,00	Ada
18		1230006072534	01-JUL-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	4337469A155GACMO - 000000405002	411124	IDR	35.200,00	Ada
19		3010194605	30-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN	478888NA48JA2B9 -	411122	IDR	54.550,00	Ada

Dicetak oleh : Ester Florida,
Tanggal Cetak : 14-Jul-2016 12:07:13 MALAM

Hal 1 dari 4



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal : 14-JUL-2016

KPPN : JAKARTA V
Kode Saliker : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No Urut	KPPN	Nomor Rekening	Tanggal Buku	Nama WP/WB/WS	NTPN - NTB	Akun	Mata Uang	Jumlah Setor	Keterangan
				PEMBINA	000000241324				
20		3010194605	24-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	54713DV5GRS6F09 - 000000067452	411121	IDR	210.000,00	Ada
21		3010194605	30-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	57D148NK8KCE3B9 - 000000238368	411211	IDR	181.818,00	Ada
22		3010194605	24-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	595F53B7LEUGLO9 - 000000444836	411124	IDR	56.000,00	Ada
23		3010194605	24-JUN-2016	PUTRA SUSOH MANDIRI	5C6313B1UL50Q109 - 000000418657	411211	IDR	136.264,00	Ada
24		3010194605	24-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	5FEDD3DL6HQVQO9 - 000000034628	411121	IDR	450.000,00	Ada
25		3010194605	24-JUN-2016	KURNIA JAYA	628B338B8F45IO9 - 000000465322	411211	IDR	177.818,00	Ada
26		1230006072534	01-JUL-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	64CS25U6C4RNSMO - 000000396405	411121	IDR	105.000,00	Ada
27		3010194605	30-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	678678NB12JUSD89 - 000000246382	411121	IDR	1.665.000,00	Ada
28		3010194605	30-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	6D94F02USKRM89 - 000000719154	411121	IDR	270.000,00	Ada
29		3010194605	24-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	78AED3D577KMUO9 - 000000073974	411121	IDR	360.000,00	Ada
30		3010194605	24-JUN-2016	PUTRA SUSOH MANDIRI	7C9213DR98C45F09 - 000000090959	411211	IDR	272.473,00	Ada
31		3010194605	24-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	7CEE3CL2A8HCL09 - 000000660139	411121	IDR	450.000,00	Ada
32		3010194605	30-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	7FE5C8C39G211B9 - 000000397615	411124	IDR	5.545,00	Ada
33		3010194605	24-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	8A53336L3JMTG09 - 000000091161	411121	IDR	450.000,00	Ada
34		3010194605	30-JUN-2016	BEND.PENGELUARAN BADAN PEMBINA	92463299QVQKB89 - 000000381789	411121	IDR	405.000,00	Ada
35		3010194605	24-JUN-2016	PUTRA SUSOH MANDIRI	986F83C8M65TUCC09 - 000000259478	411121	IDR	227.236,00	Ada
36		3010194605	24-JUN-2016	PUTRA SUSOH MANDIRI	A187ADG2MFGV09 - 00000001090	411122	IDR	40.900,00	Ada
37		3010194605	24-JUN-2016	PERINTIS ARDATAMA	A2D303C71HENDV09 -	411122	IDR	68.200,00	Ada

Dicetak oleh : Ester Florida,
Tanggal Cetak : 14-Jul-2016 12:07:13 MALAM

Hal 2 dari 4



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal : 14-JUL-2016

KPPN : JAKARTA V
Kode Salter : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No Urut	KPPN	Nomor Rekening	Tanggal Buku	Nama WP/WB/WS	NTPN - NTB	Akun	Mata Uang	Jumlah Sator	Keterangan
					00000583631				
38		3010194605	24-JUN-2016	PUTRA SUSOH MANDIRI	A71663CBA91VFB09 - 00000532149	411211	IDR	181.618,00	Ada
39		3010194605	24-JUN-2016	PUTRA SUSOH MANDIRI	ARE62385ABQJP309 - 00000431989	411211	IDR	181.682,00	Ada
40		3010194605	24-JUN-2016	BEND. PENGELUARAN BADAN PEMBINA	AE9F93AVH8HR4709 - 00000407227	411124	IDR	252.000,00	Ada
41		1230006072534	01-JUL-2016	BEND. PENGELUARAN BADAN PEMBINA	AFACU3U4GRFFAKMO - 00000395505	411124	IDR	70.400,00	Ada
42		3010194605	30-JUN-2016	BEND. PENGELUARAN BADAN PEMBINA	AFD58N8T5JTECB9 - 00000251632	411121	IDR	1.710.000,00	Ada
43		3010194605	24-JUN-2016	PUTRA SUSOH MANDIRI	B170D3AV9VNBHM09 - 00000403586	411211	IDR	113.527,00	Ada
44		3010194605	24-JUN-2016	PUTRA SUSOH MANDIRI	B6653CFMFCCU709 - 00000588395	411211	IDR	181.736,00	Ada
45		3010194605	30-JUN-2016	BEND. PENGELUARAN BADAN PEMBINA	B92EC6NAIGUENB99 - 00000243918	411122	IDR	63.000,00	Ada
46		3010194605	24-JUN-2016	BEND. PENGELUARAN BADAN PEMBINA	BB56738861DTS609 - 000000447	411121	IDR	450.000,00	Ada
47		3010194605	24-JUN-2016	PERINTIS ARDATAMA	C7A9E389686GBT09 - 00000442855	411211	IDR	454.455,00	Ada
48		3010194605	30-JUN-2016	EBEN HAEZER	D54E78L0YK7TA4B9 - 00000732126	411122	IDR	40.950,00	Ada
49		3010194605	30-JUN-2016	BEND. PENGELUARAN BADAN PEMBINA	D72816LN4DB3CB9 - 00000754491	411124	IDR	42.000,00	Ada
50		3010194605	30-JUN-2016	BEND. PENGELUARAN BADAN PEMBINA	D8A2F8NCKNMLTB9 - 00000255523	411121	IDR	105.000,00	Ada
51		3010194605	24-JUN-2016	PUTRA SUSOH MANDIRI	D34E389634RRS09 - 00000438619	411211	IDR	181.727,00	Ada
52		3010194605	24-JUN-2016	BEND. PENGELUARAN BADAN PEMBINA	DF8D938GNTSP809 - 00000485210	411121	IDR	105.000,00	Ada
53		3010194605	24-JUN-2016	PUTRA SUSOH MANDIRI	E75523CUJAE57D09 - 00000699730	411211	IDR	272.636,00	Ada
54		3010194605	30-JUN-2016	BEND. PENGELUARAN BADAN PEMBINA	EB91C053EIP610B9 - 000000648413	411121	IDR	405.000,00	Ada
55		3010194605	24-JUN-2016	BEND. PENGELUARAN BADAN	ECCE13DHKSNETP09 -	411121	IDR	540.000,00	Ada

Dicetak oleh : Ester Florida,
Tanggal Cetak : 14-Jul-2016 12:07:13 MALAM

Hal 3 dari 4



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal : 14-JUL-2016

KPPN : JAKARTA V
Kode Salter : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No Urut	KPPN	Nomor Rekening	Tanggal Buku	Nama WP/WB/WS	NTPN - NTB	Akun	Mata Uang	Jumlah Sator	Keterangan
				PEMBINA	00000013075				
56		3010194605	24-JUN-2016	BEND. PENGELUARAN BADAN PEMBINA	FS99B3CMF4E3QV09 - 00000466393	411121	IDR	450.000,00	Ada
57		3010194605	30-JUN-2016	BEND. PENGELUARAN BADAN PEMBINA	F97568N8HTD9NBT9 - 00000234247	411122	IDR	66.000,00	Ada
58		3010194605	24-JUN-2016	PERINTIS ARDATAMA	FA6803BA082IGEO9 - 00000456679	411122	IDR	68.200,00	Ada

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara



Dicetak oleh : Ester Florida,
Tanggal Cetak : 14-Jul-2016 12:07:13 MALAM

DATA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Satker 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO	KODE NTPN	KODE NTB	KODE AKUN	JUMLAH
1.	008573DUMM4RJ7O9	000000083069	411121	2.385.000,00
2.	032755T2IGHVQLMO	000000394465	411121	105.000,00
3.	0466C054Q7ONG6B9	000000651251	411122	510.400,00
4.	1060F3C3378KSTO9	000000563195	411121	1.350.000,00
5.	159965V6G91EGQMO	000000398447	411121	450.000,00
6.	1BC028LP9CJG0B9	000000768777	411122	54.550,00
7.	1CEF75V4BJ3V4EMO	000000397431	411121	1.755.000,00
8.	1F2685SVRP72BRMO	000000392871	411121	1.800.000,00
9.	279E73DFBDDL4FO9	000000796926	411122	40.900,00
10.	28A358LNICC723B9	000000757446	411211	272.727,00
11.	2DBEA3ECSMP2TV09	000000159562	411211	454.427,00
12.	2F19F3DKAJOBKQO9	000000028883	411121	450.000,00
13.	3499C8LOOPN957B9	000000765532	411211	181.818,00
14.	34A1C8NBFK8P1FB9	000000249381	411121	105.000,00
15.	3F94D3C9A9GH79O9	000000598321	411122	34.100,00
16.	3FAF63B8L5N4GQO9	000000449688	411121	450.000,00
17.	413793B8TJPQ2FO9	000000451392	411121	38.400,00
18.	4337A60A12G5ACMO	000000400802	411124	35.200,00
19.	4798B8NA48JAA2B9	000000241324	411122	54.550,00
20.	5471F3DVSGRS6PO9	000000087452	411121	210.000,00
21.	57D148N9K8C1E3B9	000000238368	411211	181.818,00
22.	595F53B7LEIJGLO9	000000444836	411124	56.000,00
23.	5C6313B1ULS0Q1O9	000000418857	411211	136.264,00
24.	5FEDD3DL6HQIVQO9	000000034628	411121	450.000,00
25.	62BBD3BBP9F45IO9	000000465322	411211	177.818,00
26.	64C525U6UC4RNSMO	000000396405	411121	105.000,00
Jumlah Total				11.843.972,00



